

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Komunikasi yang baik menjadi salah satu solusi dalam permasalahan pembangunan. Pembangunan tidak hanya mengenai infrastruktur dan ekonomi, namun juga bagaimana manusia berinteraksi satu sama lain. Peran komunikasi persuasif di sini menjadi penting karena bukan hanya tentang pembangunan namun juga bagaimana membangun manusia di masa depan dengan lebih baik. Komunikasi dapat mengurangi risiko kegagalan proyek karena dengannya akan tercapai *commonness* yang akhirnya dapat terjalin kerjasama yang baik antar pihak (Chatra, 2020).

Hal ini berlaku pula pada program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang diluncurkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang mana tiap Penerima Bantuan yang mengikuti program mendapatkan stimulan berupa uang senilai Rp20.000.000 yakni Rp17.500.000 untuk pembelian bahan bangunan dan Rp2.500.000 untuk upah tukang dan selebihnya akan ditambah dengan swadaya dari masing-masing Penerima Bantuan (PB). Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) diperuntukkan dan menjadi stimulan bagi MBR untuk meningkatkan kualitas rumah layak huni dan sehat.

BSPS sendiri merupakan bantuan pemerintah untuk mempercepat peningkatan kualitas rumah tidak layak huni. Secara nasional, pada tahun 2023 dialokasikan peningkatan hasil kualitas hunian masyarakat mencapai sebanyak

149.750 unit rumah yang tersebar di 34 provinsi. Direktur Jenderal Perumahan Iwan Suprijanto mengungkapkan progres fisik program BPS hingga 9 Juni atau Semester I tahun 2023 telah mencapai 93.139 unit dari target total yang meningkat sebanyak 150.050 unit dengan total anggaran program BPS tahun 2023 sebanyak Rp 3,29 triliun rupiah.

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya memiliki slogan “Rumah Kita, Aksi Kita” dan “Rumah Swadaya, Ayo Swadaya” yang sejalan dengan implementasinya mewujudkan rumah layak huni dengan swadaya yang merupakan kunci keberhasilan pembangunan rumah layak huni, tentu membutuhkan kerjasama pembangunan salah satunya dalam bentuk komunikasi. Dalam pelaksanaannya dibutuhkan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) yang menjadi penggerak, komunikator sekaligus pendamping para Penerima Bantuan dalam implementasi kegiatan BPS. Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) seperti yang dijelaskan pada Buku Kerja Pendampingan (PUPR, 2019) merupakan pelaku utama pendampingan program BPS. Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) bertugas memantau pelaksanaan penyiapan masyarakat dan pekerjaan fisik hingga pendataan kondisi rumah per wilayah dampingan.

Penerima Bantuan yang merupakan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) memiliki beberapa indikator yang berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 mengenai perumahan dan kawasan pemukiman yang berdasarkan bukan hanya pada bantuan pembangunan secara fisik namun juga meliputi pada keseluruhan proses pembangunan mulai dari perencanaan hingga pengawasan. Penerima Bantuan harus mampu menyisihkan swadaya karena stimulan untuk berswadaya diperlukan untuk menunjang kesuksesan

pembangunan. Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) bertugas mendorong swadaya, baik dalam bentuk tabungan, tenaga kerja, gotong royong atau bahan bangunan yang masih layak guna atau bisa didaur ulang dari Penerima Bantuan (NAHP, 2021). Swadaya penting untuk memaksimalkan manfaat program, meningkatkan kualitas pembangunan rumah untuk mewujudkan rumah layak huni.

Berdasarkan data sebaran alokasi program ini pada 2023 terdapat 5.028 unit rumah program yang tersebar di 15 kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Padang yang merupakan ibukota Sumatera Barat memperoleh alokasi BSPS pada tahun 2023 sebanyak 1.204 unit yang terdiri dari beberapa tahapan penyaluran dan pembangunan unit rumah program. Tahap VII merupakan tahapan yang terlaksana pada penghujung tahun 2023 di Kota Padang dengan jumlah sebanyak 717 unit rumah program BPS yang tersebar di beberapa kecamatan yang berada di Kota Padang.

Sejalan pada program BPS yang dilakukan pada kelompok 717 kemarin, penulis telah melakukan observasi awal kepada beberapa Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) di wilayah dampingan yang berbeda-beda. Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Kecamatan Nanggalo mendapat tantangan mengenai kritikan swadaya dari beberapa Penerima Bantuan karena kurangnya pemahaman akan makna swadaya dan hal ini berujung kepada konflik internal disebabkan terlambatnya pengeluaran upah tukang dan beberapa Penerima Bantuan akhirnya mengundurkan diri.

Bungus sendiri tepatnya di Teluk Buo, permasalahan salah satu Penerima Bantuan yang awalnya menyetujui dana swadaya yang dikeluarkan yaitu senilai lima juta rupiah dan seiring pengerjaannya ternyata Penerima Bantuan tidak

menyanggapi yang menjadikan berhentinya kelanjutan pembangunan rumah. Kendala terkait waktu juga menjadi perhatian serius karena di dalam satu kelompok Penerima Bantuan jika dalam pengerjaannya hingga sebelum evaluasi pertama tidak selesai hingga 30%-50% maka turunnya upah tukang akan terhambat begitu pula pada evaluasi kedua, pengerjaan harus selesai hingga 100%.

Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) di wilayah dampingan Kelurahan Kalumbuk juga mengalami hal serupa terkait swadaya yakni terdapat Penerima Bantuan yang meminta untuk bahan bangunan papan tambahan yang mana tidak terdapat pada proposal dan memang diambil dari sisa puing rumah yang lama yang dibongkar dan akhirnya terjadi konflik internal antara Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) dan Penerima Bantuan. Akibat dari rangkaian hal-hal di atas dapat berdampak pada keterlambatan pembangunan dan keterlambatan penurunan upah tukang. Karena dalam satu kelompok wilayah dampingan, upah tukang dapat diturunkan jika satu kelompok telah menyelesaikan pembangunan sesuai tenggat waktu dan disampaikan oleh Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) dalam evaluasi.

Fenomena tersebut menjadikan penulis ingin mengangkat permasalahan ini ke dalam kajian komunikasi persuasif dengan pendekatan fenomenologi. Keadaan yang terjadi antara Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) dan beberapa Penerima Bantuan ada yang tidak sesuai dengan harapan. Penerima Bantuan masih ada yang tidak menepati swadaya yang telah dijanjikan, bisa karena terlambat hingga mengundurkan diri. Peningkatan swadaya yang diinginkan berupa transformasi *mindset* dan juga perilaku masyarakat penerima BSPS Padang ke depannya. Oleh karena itu penulis akan mengangkat penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi untuk melihat bagaimana pengalaman

komunikasi persuasif Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) di Kota Padang pada periode 717 kemarin untuk ke depannya dapat menjadi acuan terkhusus untuk Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) dalam mengkomunikasikan apa itu BSPS dan konsep swadaya itu sendiri.

Edmund Husserl (dalam Kuswarno, 2009) mengemukakan pendekatan fenomenologi berfokus pada pengalaman subjektif individu yang berusaha memahami makna yang mendasari pengalaman tersebut. Memahami pola dan makna secara universal di balik implementasi BSPS dan komunikasi persuasif yang dihasilkan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) di masing-masing wilayah dampungannya. Dalam hal ini Husserl mengajak untuk meninggalkan asumsi dan prasangka terhadap suatu peristiwa dan berfokus kepada pengalamannya langsung. Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) sebagai orang yang bertugas mendampingi masyarakat Penerima Bantuan BSPS dalam menyalurkan swadaya mereka dalam bentuk uang, harta benda dan tenaga dan memastikan Penerima Bantuan mematuhi aturan sampai akhir program.

Tenaga Fasilitator Lapangan perlu menguasai komunikasi persuasif untuk mendorong PB memenuhi tanggung jawab swadaya dengan optimal. Pada konteks ini, penelitian Muhammad Ramdhan tentang efektivitas komunikasi persuasif, khususnya dalam meningkatkan pengetahuan dan keterlibatan masyarakat, relevan untuk memberikan perspektif tambahan tentang pendekatan yang dapat diterapkan oleh TFL. Penelitian komunikasi persuasif yang dilakukan oleh Muhammad Ramdhan ialah mengenai efektivitas komunikasi persuasif mengenai peningkatan pengetahuan masyarakat. Dalam penelitiannya menghasilkan informasi mengenai pendistribusian informasi mengenai *Cryptocurrency* oleh Cuantomonologi

sebagai komunikator yang mencakup empat dimensi variabel, seperti kredibilitas sumber, pengaruh lingkungan, pesan juga kesinambungan pesan, namun penelitian tersebut memakai pendekatan kualitatif deskriptif (Sampurna *et al.*, 2023). Sama halnya dengan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) yang bertugas menjadi komunikator bagi Penerima Bantuan (PB), memungkinkan penulis untuk memahami makna swadaya melalui pendekatan fenomenologi, karena pada dasarnya BSPS memiliki prinsip berupaya mendorong prakarsa, partisipasi dan upaya masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi sendiri pembangunan rumah secara swadaya.

Sejalan pula dengan penelitian mengenai penghimpunan zakat yang dilakukan oleh LAZ Darussalaam, unsur-unsur komunikasi persuasif terpenuhi dengan teknik yang sering digunakan yaitu *pay-of technique* yakni mengiming-imingi harapan tertentu dan juga *fear arousing technique* yang bersifat menakut-nakuti atau menggambarkan konsekuensi buruk. Penelitian ini menghasilkan bagaimana teknik persuasif yang digunakan pada LAZ Darussalaam yang mana nantinya penelitian ini juga akan mengungkap bagaimana Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) mengadopsi teknik persuasif mereka masing-masing untuk mendorong swadaya berdasarkan pengalaman masing-masing (Rahman & Yasya, 2020).

Salah satu dari tiga indikator keberhasilan pelaksanaan BSPS yaitu Keswadayaan Masyarakat, hal ini termasuk kepada kesadaran terhadap pentingnya rumah layak huni, keaktifan proses kegiatan dan juga tergantung pada nilai/besaran swadaya yang dihasilkan. Selain kualitas rumah dan indikator tambahan seperti kesehatan, keswadayaan merupakan poin pertama yang

disebutkan. Maka dari itu peneliti melihat bahwa potensi keberhasilan pelaksanaan BSPS ialah pada bagaimana swadaya dapat digali secara tepat waktu dan sesuai kesepakatan. Karena keterlambatan dan ketidaksesuaian dapat menjadi berimbas kepada Kelompok Penerima Bantuan (KPB) mengakibatkan keterlambatan turunnya upah tukang.

Berdasarkan latar belakang, komunikasi persuasif Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) dalam menggali hasil swadaya perlu diperhatikan berdasarkan dari pengalaman Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) maupun makna swadaya itu sendiri dari Penerima Bantuan (PB). Penulis tertarik untuk meneliti proses komunikasi persuasif yang dilakukan oleh Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) dalam mendorong swadaya kepada masing-masing Penerima Bantuan di wilayah dampingan mereka. Maka judul yang akan penulis angkat ialah: Komunikasi Persuasif Fasilitator Mendorong Swadaya Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) (Studi Fenomenologi BSPS Kelompok 717 2023 di Kota Padang).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini ialah: Bagaimana komunikasi persuasif Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) mempengaruhi swadaya penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kota Padang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini ialah untuk:

- 1) Menggali pengalaman komunikasi persuasif Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) dalam mendorong swadaya penerima BSPS Kota Padang.
- 2) Menganalisis makna pengalaman Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) dalam proses komunikasi persuasif.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam bidang kehumasan khususnya dalam merancang dan melaksanakan program-program pembangunan yang melibatkan interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Termasuk juga menjadi referensi tambahan bagi peneliti lain yang mengkaji tentang komunikasi pembangunan dalam konteks kehumasan.

1.4.2 Manfaat Praktis

- 1) Menjadi bahan referensi bagi TFL selanjutnya untuk mendorong perbaikan komunikasi pada program BPS
- 2) Menjadi referensi bagi pihak terkait untuk mempraktikkan komunikasi yang lebih efektif untuk mengoptimalkan interaksi dalam lingkup organisasi dan kelompok sosial.